FATF RECOMMENDATIONS DAN IMPLEMENTASI NASIONAL: STUDI ATAS EFEKTIVITAS HARMONISASI KEBIJAKAN ANTI-MONEY LAUNDERING

M. Ady Soehatman¹, Ani Purwati², Yuherman³

Mahasiswa Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia¹

Dosen Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia^{2,3}

Email: madysoe@yahoo.co.id¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com², yuherman255@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Technological developments have had a significant impact on efforts to prevent and combat money laundering. In this context, it is necessary to harmonize Indonesia's Anti-Money Laundering legal system with the recommendations of the Financial Action Task Force as part of global efforts to combat money laundering. This study aims to analyze the normative framework of Indonesia's anti-money laundering policies in implementing FATF Recommendations, with a focus on the effectiveness of regulations for preventing and combating money laundering. The research method used is a normative legal approach, incorporating regulatory, conceptual, and comparative perspectives. The results of the study indicate that Indonesia still needs to harmonize its national legal framework with the FATF Recommendations. Therefore, further efforts are needed in Indonesia to strengthen an effective legal framework for combating money laundering.</i>
Nomor : 8	
Bulan : Agustus	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
Keyword: Money Laundering, FATF Recommendations, Harmonization	

Abstrak

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks ini, diperlukan harmonisasi sistem hukum Anti-Money Laundering di Indonesia dengan rekomendasi Financial Action Task Force sebagai upaya pemberantasan pencucian uang secara global. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif kebijakan pemberantasan pencucian uang Indonesia dalam penerapan FATF Recommendations dengan fokus pada efektivitas pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia masih perlu dilakukan upaya harmonisasi kerangka hukum nasional dengan FATF Recommendations. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut di Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan pencucian uang yang efektif.

Kata Kunci: Pencucian Uang, FATF Recommendations, Harmonisasi

A. PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini telah menggambarkan tatanan dunia baru di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi tanpa terpengaruh batasan geografis. Dalam konteks globalisasi ekonomi, menipisnya batas kegiatan ekonomi secara nasional mendorong faktor-faktor produksi lintas negara terjadi dan

melibatkan banyak pihak. Namun, perkembangan tersebut beriringan pula dengan kejahatan transnasional yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara. Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional adalah tindak pidana pencucian uang (Dian Alan Setiawan, 2024).

Praktik pencucian uang memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan dan efektivitas kebijakan ekonomi suatu negara. Lebih jauh, aktivitas money laundering berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi sektor swasta yang beroperasi secara legal, khususnya ketika pelaku kejahatan memanfaatkan entitas perusahaan fiktif untuk mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan aset yang sah. Modus ini tidak hanya mengancam integritas dan keandalan pasar keuangan, tetapi juga dapat melemahkan kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan ekonomi secara efektif. Di samping itu, implikasi negatif juga merambah ranah sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya aktivitas kriminal yang memanfaatkan sektor jasa keuangan sebagai sarana operasional (Chitto Cumbrandika et al., 2024).

Proses pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan utama (Fenty Nur Hidayah et al., 2025):

Placement (Penempatan)

Pada tahap ini, pelaku money laundering akan menempatkan harta hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal. Bentuk penempatan dilakukan dengan memecah jumlah harta agar tidak terdeteksi sistem pelaporan transaksi mencurigakan.

Layering (Pelapisan)

Pada tahap ini, harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dimasukkan dalam sistem keuangan akan dipindahkan. Aktivitas layering kerap melibatkan jaringan transaksi lintas negara, baik dengan memanfaatkan kegiatan usaha yang secara formal legal maupun melalui perusahaan yang terdaftar secara sah namun sesungguhnya tidak menjalankan aktivitas operasional apa pun.

Integration (Integrasi)

Pada tahap ini, pelaku akan mengintegrasikan harta hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang sebagai permasalahan global yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat internasional menjadi latar belakang pembentukan Financial Action Task Force (FATF) oleh negara-negara anggota G7 di Paris pada tahun 1989. Pembentukan FATF bertujuan untuk menetapkan standar internasional serta merumuskan kerangka regulasi hukum yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,

sehingga tercipta koordinasi dan konsistensi kebijakan di tingkat global (Khilda Luqyana Arifin & Yanuar Rahmadan, 2024). FATF telah menetapkan 40 rekomendasi yang menjadi standar internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai anggota penuh FATF, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi tersebut, termasuk mengintegrasikannya ke dalam berbagai instrumen regulasi, sistem penegakan hukum pidana, mekanisme pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, serta memperkuat kerja sama internasional. Kewajiban ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan standar global.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PPTPPU”) yang secara normatif menetapkan kerangka kerja untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Penguatan tersebut, antara lain, tercermin dalam penerapan kewajiban prinsip Know Your Customer (KYC) serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah rekomendasi FATF yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan dan praktik pemberantasan pencucian uang di Indonesia, sehingga diperlukan langkah harmonisasi lebih lanjut agar implementasi di tingkat nasional selaras dengan standar internasional.

Dengan melihat perkembangan tersebut, Indonesia sebagai anggota penuh FATF memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan Anti-Money Laundering (AML) di tingkat nasional selaras dengan standar internasional yang telah disepakati. Harmonisasi kebijakan ini menjadi semakin mendesak mengingat kompleksitas modus pencucian uang yang melibatkan pemanfaatan teknologi finansial, pergerakan lintas batas dana secara cepat, dan jaringan kejahatan terorganisasi. Keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyesuaian regulasi berpotensi melemahkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan money laundering.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka normatif Anti-Money Laundering di Indonesia dalam konteks implementasi FATF Recommendations?

2. Bagaimana harmonisasi kebijakan nasional dengan FATF Recommendations guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kerangka normatif kebijakan Anti-Money Laundering Indonesia dalam penerapan FATF Recommendations.
2. Mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan kelemahan implementasi kebijakan AML Indonesia terhadap standar FATF.
3. Merumuskan langkah harmonisasi kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan money laundering.

Signifikansi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara akademik maupun praktis dalam mengkaji harmonisasi sistem hukum nasional dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari aspek konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi pada analisis terhadap keterbatasan kerangka hukum nasional yang berlaku dalam mengantisipasi dan menanggulangi praktik pencucian uang. Sementara itu, dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi harmonisasi regulasi nasional dengan standar FATF yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika perkembangan sistem keuangan dan kemajuan teknologi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan untuk membentuk rezim hukum yang komprehensif dan efektif.

Landasan Teori

Kebijakan Anti-Pencucian Uang di Indonesia

Kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia berlandaskan pada UU PPTPPU. Regulasi tersebut memuat ketentuan yang komprehensif, mencakup kriminalisasi perbuatan pencucian uang, mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), serta pemberian kewenangan bagi otoritas terkait untuk melakukan penundaan transaksi.

Dalam pelaksanaannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berfungsi sebagai unit intelijen keuangan yang bersifat independen, dengan mandat untuk melakukan analisis terhadap transaksi keuangan serta menyampaikan rekomendasi hasil analisis tersebut kepada aparat penyidik (Purwanti et al., 2024). Pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan anti-pencucian uang dilaksanakan secara berlapis melalui keterlibatan pengawas sektoral, sehingga tercipta koordinasi yang terstruktur antara lembaga terkait untuk memastikan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Harmonisasi Regulasi Nasional dan Internasional

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian ketentuan hukum nasional dengan standar internasional untuk mewujudkan keseragaman prinsip, norma, serta mekanisme penerapan hukum (Surya, 2023). Dalam kerangka kebijakan Anti-Money Laundering (AML), harmonisasi dilakukan agar regulasi nasional sejalan dengan best practices global yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti FATF.

Upaya ini memiliki signifikansi strategis karena memungkinkan terjalannya keterpaduan antara sistem hukum nasional dan mekanisme pengawasan lintas negara. Hal ini krusial mengingat tindak pidana pencucian uang memiliki karakter transnasional yang menuntut kerja sama internasional untuk efektivitas pencegahan dan pemberantasannya.

Saat ini telah terdapat FATF Recommendations yang berfungsi sebagai pedoman internasional bersifat soft law, yaitu tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana perjanjian internasional, namun diakui secara luas sebagai standar global dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (Aspan et al., 2024).

Efektivitas implementasi soft law ini didukung oleh mekanisme mutual evaluation yang dilaksanakan secara periodik. Hasil penilaian tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap reputasi suatu negara dalam sistem keuangan global. Negara yang dinilai tidak patuh berisiko masuk ke dalam grey list atau black list, yang dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi signifikan seperti penurunan kepercayaan investor serta hambatan dalam hubungan perbankan lintas negara (correspondent banking). Oleh karena itu, meskipun bersifat soft law, FATF Recommendations memiliki compliance pull yang kuat sehingga mendorong negara untuk menyesuaikan regulasi dan kebijakannya agar sejalan dengan standar tersebut.

Kerangka FATF 40 Recommendations

Kerangka FATF 40 Recommendations terdiri dari:

Preventive Measures – mencakup kewajiban penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report), dan pengaturan Beneficial Ownership. Tujuannya adalah mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Criminal Justice Measures – meliputi penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, serta kerja

sama internasional dalam bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Pilar ini memperkuat aspek represif melalui instrumen hukum pidana.

Institutional Measures – berfokus pada penguatan kapasitas institusi seperti Financial Intelligence Unit, lembaga pengawas sektor keuangan, dan koordinasi lintas lembaga. Termasuk pula pengaturan mekanisme pertukaran informasi domestik maupun internasional secara cepat dan aman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Metode ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur ilmiah di bidang hukum melalui pengkajian asas-asas, doktrin, dan teori hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan isu penelitian. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis-positif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis, teori hukum, dan kajian perbandingan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif (Soekanto, 2009).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan beberapa model pendekatan. Pertama, statute approach digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Kedua, conceptual approach bertujuan untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep mendasar yang menjadi dasar analisis hukum. Ketiga, comparison approach digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik di Indonesia dengan sistem hukum negara lain.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi hukum positif yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Melalui spesifikasi ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan aktual pada saat penelitian dilakukan, serta menganalisisnya secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soekanto, 1986).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan menelusuri, menghimpun, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma hukum, pendapat akademisi, serta dokumen yuridis lainnya, sehingga dapat membangun argumentasi hukum yang utuh dan mendalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mengolah dan menyusun data secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum maupun norma yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kerangka Normatif Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia

Secara historis, upaya Indonesia dalam memenuhi 40 rekomendasi FATF dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun menjadi tonggak awal pembentukan rezim Anti-Money Laundering (AML) di Indonesia, regulasi ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Salah satu kelemahan mendasar adalah adanya batasan nilai sebesar Rp500 juta, sehingga hasil tindak pidana dengan nilai di bawah jumlah tersebut tidak dapat dituntut sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain itu, cakupan predicate offences dalam rezim AML Indonesia pada saat itu sangat terbatas, yakni hanya meliputi 15 kategori tindak pidana. Pembatasan tersebut semakin diperlemah oleh tidak dimasukkannya tindak pidana perjudian ke dalam daftar tindak pidana asal yang dapat menjadi objek pencucian uang. Kondisi ini belum sepenuhnya sejalan dengan standar FATF yang merekomendasikan agar setiap negara memperluas cakupan tindak pidana asal dengan memasukkan seluruh kategori serious offences ke dalam lingkup AML, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik money laundering (PPATK, 2021). Lebih lanjut, regulasi tersebut juga belum mengatur secara tegas larangan anti tipping-off provision. Ketiadaan ketentuan ini berpotensi melemahkan efektivitas proses pelaporan dan analisis transaksi mencurigakan, karena memungkinkan pihak terlapor mengambil langkah untuk menyembunyikan atau memindahkan aset sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum.

Mengingat berbagai kelemahan yang terdapat dalam pengaturan awal, pembentuk undang-undang kemudian melakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Revisi ini bertujuan mengakomodasi serta memperbaiki sejumlah aspek materi yang sebelumnya menjadi titik lemah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang. Sebagai langkah lebih lanjut untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang, pada 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menggantikan regulasi yang lama.

Dalam penjelasan umum, undang-undang ini disusun tidak hanya untuk memenuhi kepentingan nasional, tetapi juga menyesuaikan diri dengan standar internasional yang berlaku. Muatan materi yang diatur dalam UU tersebut meliputi beberapa aspek penting, antara lain: redefinisi konsep tindak pidana pencucian uang; penyempurnaan ketentuan mengenai kriminalisasi; pengaturan sanksi pidana dan administratif; penguatan prinsip know your customer (KYC); perluasan kategori pihak pelapor; penetapan jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; pengaturan mekanisme pengawasan kepatuhan; perluasan instansi penerima hasil analisis atau pemeriksaan dari PPATK; penataan kelembagaan PPATK; penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan penghentian sementara transaksi; penataan hukum acara pemeriksaan; serta pengaturan mekanisme penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Selain itu, UU ini juga mempertegas posisi PPATK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, PPATK diwajibkan menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi dari pihak manapun demi menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan kepatuhan suatu negara terhadap 40 rekomendasi FATF, digunakan instrumen Mutual Evaluation Report (MER) yang terdiri dari dua kategori penilaian, yaitu Effectiveness Ratings dan Technical Compliance Ratings. Berdasarkan MER Asia Pacific Group (APG) terhadap Indonesia pada tahun 2018, skor efektivitas program anti pencucian uang Indonesia mencapai 26 dari 33 poin, atau setara dengan 78,7%. Sementara itu, dalam aspek kepatuhan teknis terhadap 40 rekomendasi FATF, Indonesia memperoleh skor 80 dari 120 poin, yang setara dengan 66,7% (Fanny, 2023).

Namun demikian, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU PPTPPU") yang melibatkan berbagai sektor, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kerja sama internasional dalam rangka penegakan hukum lintas negara, minimnya jumlah subjek pelapor yang berpartisipasi aktif, serta

keterbatasan sistem informasi yang tersedia untuk mendukung proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif dan efisien. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan penting yang perlu diatasi agar Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar FATF secara menyeluruh (Nainggolan, 2024).

Harmonisasi Kebijakan Nasional dengan FATF Recommendations

Salah satu kelemahan rezim anti-money laundering (AML) di Indonesia terletak pada cakupan subjek pelapor yang masih terbatas, sehingga tidak semua pihak yang memiliki peran signifikan dalam pencegahan dan deteksi tindak pencucian uang diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Berdasarkan Pasal 17 UU PPTPPU, kewajiban pelaporan hanya diberlakukan kepada sejumlah pihak, antara lain penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan/atau jasa tertentu. Namun, apabila mengacu pada rekomendasi FATF khususnya poin 22 dan 23, cakupan subjek pelapor seharusnya lebih luas, termasuk profesi-profesi strategis seperti notaris dan pengacara yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik pencucian uang. Oleh karena itu, perluasan subjek pelapor menjadi sangat penting untuk menutup celah regulasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh pelaku pencucian uang, sekaligus memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan tindak pidana tersebut secara komprehensif.

Rekomendasi FATF nomor 24 dan 25 menekankan pentingnya transparansi mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat korporasi sebagai langkah krusial dalam mencegah praktik pencucian uang. Setiap negara diharuskan untuk memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat tersebut dapat diakses dan diawasi secara efektif guna menghindari penyalahgunaan entitas korporasi sebagai alat pencucian uang. Di Indonesia, ketentuan terkait beneficial ownership telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("Perpres 13/2018"). Namun demikian, peraturan ini belum terintegrasi secara langsung ke dalam UU PPTPPU. Selain itu, akses informasi beneficial ownership juga sangat terbatas dan tidak dapat diakses oleh publik umum, melainkan hanya dibuka secara eksklusif kepada instansi tertentu yang secara ketat didefinisikan, seperti aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta otoritas berwenang dari negara lain. Kondisi ini memperlemah transparansi dan potensi pengawasan terhadap aktivitas korporasi yang rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat integrasi dan aksesibilitas informasi beneficial ownership dalam kerangka hukum nasional (ICW, 2022).

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres 13/2018) pada dasarnya masih sangat bergantung pada inisiatif dan keaktifan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaatnya. Pendekatan ini menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan pengungkapan informasi tersebut bersifat sukarela (*voluntary*) atau mengandalkan mekanisme *self-assessment*, yang berbeda dengan prinsip transparansi dan kewajiban yang dianjurkan dalam rekomendasi FATF. Dari segi substansi, Perpres 13/2018 belum sepenuhnya sejalan dengan standar *best practices* yang ditetapkan oleh FATF, khususnya dalam hal keterbukaan dan transparansi data pemilik manfaat. Selain itu, peraturan ini tidak mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk mempublikasikan informasi pemilik manfaat yang telah didata, padahal FATF secara jelas merekomendasikan agar informasi tersebut dapat diakses secara terbuka guna memperkuat transparansi korporasi dan mendukung upaya pencegahan pencucian uang. Dengan demikian, Perpres 13/2018 perlu dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemilik manfaat korporasi (Sugiharti, 2022).

Sebagai perbandingan, kerangka regulasi mengenai *beneficial ownership* di Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur. Setiap korporasi di Singapura diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dan menyampaikan data terkait pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Article 386AF ayat (1) dan (2) dari Companies Act 1967 yang telah direvisi melalui Companies Amendment Act. Berdasarkan aturan tersebut, perseroan wajib secara aktif mendaftarkan informasi mengenai pengendali perusahaan sebagai bagian dari kewajibannya. Selain itu, Article 386AF ayat (12) dari Singapore Companies Act mengatur bahwa korporasi yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sistem ini tidak hanya menegaskan kewajiban pelaporan, tetapi juga memberikan efek jera melalui sanksi yang jelas, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi dalam rangka mendukung upaya pencegahan pencucian uang. Pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperkuat regulasi terkait *beneficial ownership* agar lebih efektif dan sesuai dengan standar internasional (Natasya, 2024).

Pelaksanaan harmonisasi regulasi nasional dalam upaya pemberantasan pencucian uang dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF memiliki dampak strategis yang signifikan. Pertama, penyesuaian kerangka hukum nasional dengan FATF Recommendations

diyakini dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam proses mutual evaluation, yang menjadi tolok ukur efektivitas sistem anti pencucian uang suatu negara. Kedua, harmonisasi regulasi tersebut berperan penting dalam menurunkan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, dengan tercapainya tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap FATF Recommendations, sistem keuangan Indonesia akan mendapatkan persepsi positif dari komunitas internasional, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Dengan demikian, harmonisasi regulasi AML tidak hanya memperkuat aspek hukum dan pengawasan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (OJK, 2024).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya dengan 40 Rekomendasi FATF, rezim anti pencucian uang di Indonesia masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah pengaturan keterbukaan informasi mengenai beneficial ownership yang belum optimal, yang berimplikasi pada kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan korporasi. Selain itu, cakupan subjek pelapor (designated non-financial businesses and professions) masih terbatas, sehingga potensi pelaporan dari pihak-pihak strategis dalam pencegahan pencucian uang belum maksimal. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur tentang prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership) masih mengadopsi mekanisme self-assessment dan tidak mewajibkan keterbukaan publik atas data tersebut, berbeda dengan standar best practices yang dianjurkan FATF. Kondisi-kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya tingkat technical compliance dan efektivitas (effectiveness) yang tercermin dalam hasil mutual evaluation, sehingga menuntut upaya harmonisasi dan reformasi regulasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja sistem anti pencucian uang di Indonesia.

SARAN

1. Revisi UU PPTPPU untuk mewajibkan pendaftaran dan keterbukaan publik data beneficial ownership sesuai dengan FATF Recommendation.
2. Perluasan subjek pelapor meliputi sektor non-keuangan strategis (DNFBPs) seperti pengacara, notaris, akuntan publik.
3. Penguatan koordinasi antar lembaga dengan membangun sistem pertukaran informasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Khilda Luqyana & Yanuar Rahmadan. (2024). Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 449.
- Aspan, Henry, et.al. (2024). Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 20(2), 354.
- Cumbrandika, Chitto, Naufal Khozi Satria, dan Nurmalia Ihsana. (2024). Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 02(01), 42.
- Desi, Natasya Desi & Sofa Laela. (2024). Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas di Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(4), 245.
- Hidayah, Fenty Nur, et.al. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 144.
- Indonesian Corruption Watch. (2022). Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi. 35.
- Nainggolan, Sri Cici & Yudi Kornelis. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Judge : Jurnal Hukum*, 05(02), 177.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 2024-2028. 72.
- Purwanti, Tri Indah, et.al. (2024). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 11(3), 1671.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. 28.

- Rengganis, Fany Dewi & Dwi Setiawan Susanto. (2023). Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 236.
- Setiawan, Dian Alan. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, dan Eropa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed., vol. 11. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surya, Ida. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 4.
- Sugiharti, Kristantini & Yetty Komalasari Dewi. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 151.